

FORMASI NEGARA NEOLIBERAL DAN KEBANGKITAN KOMUNALISME

ERIC HIARIEJ

Abstrak

Neoliberalisme yang selama ini dibayangkan pro pasar, pro individualisme, anti komunal, dan meminggirkan peran negara, pada kenyatannya kini mengalami kontradiksi-kontradiksi. Fenomena sosial politik mutakhir memperlihatkan bagaimana gerakan neoliberalisme justru mendorong kebangkitan komunalisme, sebagaimana diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin negara maju. Kampanye anti fundamentalis oleh Bush di Amerika, atau kampanye anti pendatang yang diserukan oleh Howard di Australia, diakui atau tidak, berdampak pada menguatnya ikatan komunal antar sesama sebangsa. Kecurigaan berlebihan, yang bahkan mengarah pada rasisme, menjadi efek lanjutan yang tak terhindarkan. Aspek politis dan etis seringkali terlewatkan.

Dalam tiga sampai empat dekade terakhir dunia menyaksikan dua perkembangan yang bertolakbelakang. Di satu sisi gelombang liberalisasi ekonomi membuat batas-batas negara mudah tembus dan tembus pandang; di sisi lain, kebangkitan komunalisme baru dalam bentuk-bentuk (etno)nasionalisme, fundamentalisme agama, dan rasisme kelihatannya hendak memutar balik jarum jam, membuat dunia kembali terkotak-kotak. Jika menggunakan cara berpikir penulis-penulis seperti Fukuyama (1992), Huntington (1996), dan Friedman (1999) dua perkembangan ini mencerminkan konflik antara “kemajuan” dan “masa depan” melawan “keterbelakangan” dan “masa lalu”. Pertarungan ini, bagi neo-hegelianisme ala Fukuyama, akan membawa kemenangan tak terelakkan bagi liberalisasi ekonomi sebagai tanda berakhirnya sejarah dan perang ideologi.

Beberapa penulis lain melihatnya jauh lebih rumit. Benjamin Barber (1995) bukan saja menemukan konflik, tapi lebih banyak mendapatkan harmoni yang ganjil antara globalisasi, sebagai efek paling penting dari liberalisasi ekonomi, dan komunalisme. Hubungan saling melengkapi yang aneh ditemukan Barber dalam, misalnya, figur milisi Serbia yang mengenakan ikon-ikon globalisasi seperti sepatu “Nike” dan perlengkapan elektronik “*walkman*” saat membasmi etnik Bosnia atas nama purifikasi bangsa Slavia. Dalam praktiknya, dunia tanpa batas

Eric Hiariej mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ruang dan waktu yang ditimbulkan oleh liberalisasi ekonomi justru menjadi lahan subur bagi bangkitnya komunalisme yang tidak harus berarti penolakan terhadap globalisasi. Bentangan etnik (*ethnoscape*) adalah konsep yang digunakan Arjun Appadurai (1992) untuk menjelaskan kemunculan beberapa bentuk komunalisme baru sebagai konsekuensi “kekacauan budaya” yang ditimbulkan oleh, misalnya, ketidaksesuaian antara pergerakan fisik seseorang dan kedekatan psikologis dengan budaya setempat.

Berangkat dari cara pandang kedua, tulisan ini melihat komunalisme sebagai bagian yang sulit diceraikan dari liberalisasi ekonomi. Penulis akan menunjukkan komunalisme justru, sampai batas-batas tertentu, diperlukan untuk menyukseskan proses liberalisasi ekonomi itu sendiri. Tidak mengherankan jika nasionalisme dan fundamentalisme agama juga muncul di negara-negara maju seperti Amerika, Perancis, dan Australia karena pemerintah negara-negara ini memerlukan propaganda-propaganda yang berbau rasisme, ironinya, untuk mendukung proses perluasan mekanisme pasar ke seluruh aspek kehidupan. Di saat bersamaan, liberalisasi ekonomi—terutama dalam pengertian upaya menempatkan pasar sebagai mekanisme sosial yang dominan—melahirkan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang menyuburkan narsisme, xenophobia dan rasisme.

Secara khusus penulis akan menjelaskan korelasi positif tersebut dalam konteks formasi negara neoliberal. Seperti yang akan diuraikan lebih rinci di bawah, negara neoliberal adalah jenis negara yang muncul seiring proses liberalisasi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip neoliberalisme, yang dimulai pada awalnya hanya di sejumlah negara pada dekade 1970-an. Proses pembentukan negara neoliberal melahirkan beberapa kontradiksi yang diatasi, salah satunya, dengan kampanye nasionalisme dan sentimen agama. Kampanye ini mudah membangkitkan komunalisme karena neoliberalisme sebagai ideologi yang menjiwai proses liberalisasi ekonomi berpotensi melahirkan masyarakat yang rasis. Penulis akan memulai dengan membahas formasi negara neoliberal. Setelah menjelaskan sejumlah kontradiksi internal negara neoliberal, tulisan ini akan membahas kemunculan nasionalisme, sentimen agama dan rasisme, terutama di negara-negara maju.

Negara Neoliberal

Negara dalam tradisi liberal merupakan alat politik yang diperlukan untuk melindungi hak dan kebebasan. Sementara pemikir klasik seperti John Locke, Montesquieu, dan James Madison berbicara tentang *separation of power, checks-and-balances*, federalisme dan masyarakat sipil (MacPherson 1977; Held 2006), pemikir liberal modern seperti Friedrich Hayek (1978; 1994), Milton Friedman (1982) dan Robert Nozick (1974)—yang penulis anggap sebagai teoretisi peletak

dasar neoliberalisme—percaya pasar merupakan satu-satunya mekanisme sosial yang mampu mewujudkan dan menjamin kemerdekaan individu. Hayek dan Friedman, terutama, melihat persoalan mendasar masyarakat modern berkaitan dengan upaya menemukan cara mengkoordinasikan aktivitas sosial yang beragam sembari mengurangi ketegangan dan konflik tanpa harus mencederai hak-hak politik dan kebebasan sipil. Menurut keduanya, mekanisme pasar—yang beroperasi menurut logika “tangan-tangan tidak kelihatan” yang digambarkan Adam Smith—adalah proses pembuatan keputusan paling memuaskan yang dilakukan secara kolektif tapi berbasiskan individu-individu yang diberikan peluang seluas-luasnya untuk mengejar kepentingan pribadi sebanyak-banyaknya dengan menggunakan segala sumberdaya yang dimilikinya. Karena itu, negara bagi para neoliberalis pertama-tama harus berpihak pada pasar dan menegakkan lembaga-lembaga yang dibutuhkan bagi beroperasinya perdagangan dan pasar bebas.

Tapi agar pasar bebas bisa bekerja secara optimal, hukum dan ketertiban harus terjaga (Wood 1999; Harvey 2005; lihat juga Nozick 1974). Negara untuk itu bertugas menjamin aturan hukum yang berfungsi untuk mengatasi kriminalitas dan mencegah monopoli atau segala bentuk konsentrasi kekuasaan yang bisa menimbulkan distorsi pasar. Tegaknya aturan hukum juga memungkinkan setiap individu melakukan interaksi dan transaksi secara leluasa, berdasarkan kerangka legal yang mewajibkan setiap pihak menghormati kesepakatan yang sudah dibuat dan menghargai kemerdekaan setiap pelaku pasar untuk bertindak, berekspresi, dan memilih. Tanpa hukum dan ketertiban, pasar menjadi tidak ada bedanya dengan tindakan saling menyingkirkan antara sesama manusia seperti yang dibayangkan Thomas Hobbes dengan kondisi *State of Nature*.

Selain hukum dan aturan main yang tegas dan tidak pandang bulu, negara juga harus berpihak dan melindungi hak milik pribadi (MacEwan 1999). Pertama, hak milik pribadi adalah syarat tak terelakkan bagi pasar bebas. Pasar sebagai tempat pertemuan permintaan dan penawaran tidak mungkin terjadi jika milik pribadi yang memungkinkan terjadinya pertukaran antara pihak-pihak yang terlibat dan dipandu oleh mekanisme harga tidak diakui. Tidak ada pasar tanpa pertukaran dan tidak ada pertukaran tanpa pemilikan pribadi. Kedua, pemilikan pribadi adalah hak dan kebebasan sipil itu sendiri. John Locke (MacPherson 1977; Held 2006), misalnya, menganggapnya sebagai hak manusia paling mendasar yang harus dilindungi negara. Ancaman dan penolakan terhadap hak milik pribadi merupakan pelanggaran paling berat terhadap kemerdekaan individu.

Dalam perkembangannya, pengakuan terhadap hak milik pribadi berarti perlindungan terhadap hak membuka usaha dan mendirikan perusahaan—yang secara legal dihitung sebagai individu (Harvey 2005; MacEwan 1999). Perkembangan ini mudah dimengerti sebab kewirausahawan dan perusahaan swasta dianggap sebagai

kunci bagi inovasi dan kesejahteraan. Melalui hak paten, misalnya, hak milik intelektual yang bersifat pribadi dijamin dengan maksud mendorong perubahan teknologi. Pada gilirannya perkembangan teknologi tanpa henti memungkinkan keberlangsungan pertumbuhan produktivitas yang menghasilkan peningkatan standar hidup bagi setiap orang dari waktu ke waktu. Berdasarkan asumsi klasik, *a rising tide lifts all boats*, teori-teori neoliberal yakin pengentasan kemiskinan pada level domestik dan internasional paling baik dilakukan oleh pasar dan perdagangan bebas.

Tak heran, selain membangun perangkat politik yang berpihak pada pasar bebas, hukum dan aturan main dan hak milik pribadi, negara dalam tradisi neoliberal berperan penting memperluas mekanisme pasar ke seluruh aspek kehidupan (Wood 1999; MacEwan 1999; Harvey 2005; Hoogvelt 2001). Tidak adanya pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, yang berlaku luas di sebagian besar negara berkembang, dilihat sebagai hambatan kelembagaan paling utama bagi pembangunan ekonomi, peningkatan kemakmuran, dan demokrasi. Privatisasi dan pemberian basis legal terhadap milik pribadi dilihat sebagai jalan terbaik untuk menghindarkan masyarakat dari *tragedy of commons*, yakni kecenderungan para individu memanfaatkan sumberdaya milik umum seperti air dan tanah secara berlebih-lebihan dan tidak bertanggung jawab. Karena itu negara—setidaknya secara teoritik—harus menyerahkan semua sektor yang dulu dikelolanya kepada pihak swasta dan membuka jalan bagi komodifikasi sektor-sektor lain yang belum terjamah prinsip-prinsip pasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perawatan anak.

Negara juga perlu mendorong kompetisi antara individu, antar perusahaan dan antar entitas teritorial (misalnya kota dan wilayah) (Jessop 2002). Ditambah dengan privatisasi dan deregulasi, kompetisi berpotensi besar mengeliminasi korupsi dan berbagai penyelewengan kekuasaan birokrasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperbaiki kualitas barang dan jasa dan mengurangi biaya produksi. Secara langsung konsumen berada dalam posisi yang paling diuntungkan dengan tersedianya komoditi kebutuhan hidup sehari-hari dengan harga yang semakin murah dan secara tidak langsung melalui pengurangan beban pajak. Sementara hak politik dan kebebasan sipil dilindungi penuh oleh pasar, setiap individu dianggap bertanggung jawab atas semua tindakan dan kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Prinsip ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan jaminan pensiun. Keberhasilan atau kegagalan seseorang dipahami dengan kaca mata kebaikan kewirasusahawan atau kegagalan personal (seperti tidak melakukan investasi yang memadai bagi perkembangan kapasitas pribadi melalui pendidikan) ketimbang menyalahkan kegagalan sistemik seperti proses peminggiran kelas yang umumnya ditimbulkan kapitalisme.

Neoliberalisme menganggap penting pergerakan komoditi dan modal yang bebas lintas sektor, wilayah, dan negara (Wood 2003; Hoogvelt 2001; Harvey 2005). Sementara kebebasan yang sepadan tidak diberlakukan bagi mobilisasi buruh melewati batas teritorial, negara wajib menyerahkan kedaulatannya atas komoditi dan modal kepada pasar global dan menyingkirkan semua penghalang pergerakan bebas tersebut (seperti tarif, perangkat fiskal, atau hambatan atas nama pelestarian lingkungan) kecuali pada sektor-sektor yang berkaitan erat dengan “keamanan nasional”. Untuk itu, pada level internasional, negara perlu secara bersama-sama mencari dan menegosiasikan pengurangan semua bentuk hambatan perdagangan dan arus modal. Secara historis forum semacam G7 yang beranggotakan Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Kanada dan Jepang (kemudian menjadi G8 setelah Rusia bergabung) merupakan bentuk kolaborasi Negara-negara Utara dalam rangka menghilangkan hambatan fiskal maupun non-fiskal terhadap arus barang dan modal. Dalam cakupan yang lebih luas, upaya memerangi penghalang pergerakan bebas komoditi dan modal dilakukan WTO. Neoliberalisme percaya upaya ini diperlukan untuk mendorong persaingan sehat antar negara, yang bermanfaat besar bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas, merendahkan harga barang dan jasa dan karenanya secara otomatis mengendalikan tingkat inflasi. Tapi, konsekuensinya negara perlu terus menerus melakukan reorganisasi internal dan menemukan rancangan kelembagaan yang baru untuk memperbaiki daya saingnya (Hoogvelt 2001; Jessop 2002; Harvey 2005).

Satu hal penting yang perlu digarisbawahi, neoliberalisme selalu mencurigai demokrasi (lihat Hayek 1978; 1994). Pemerintahan oleh suara mayoritas dipandang berpotensi membahayakan hak-hak individu dan kebebasan yang bersifat konstitusional. Demokrasi diterima sebagai “barang mewah”, hanya mungkin berkembang pada masyarakat yang relatif makmur dengan keberadaan kelas menengah yang berukuran besar untuk memastikan stabilitas politik.¹ Neoliberalisme, karena itu, lebih menyenangi pemerintah yang dikendalikan ahli, ilmuwan dan teknokrat, sekalipun ketiganya jarang memiliki basis representasi politik yang bisa dipertanggungjawabkan selain klaim dan retorika “atas nama rakyat”. Sebaliknya para politisi yang memiliki legitimasi sesungguhnya karena terpilih melalui proses demokratis—seberapapun buruk politisi yang bersangkutan—dipandang sebelah mata bahkan dituduh sebagai sumber masalah ketika pasar—yang secara alamiah cenderung tidak stabil—gagal berfungsi seperti yang dibayangkan buku teks neoliberal. Sejalan dengan itu, keberpihakan diberikan kepada model pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan dominasi eksekutif dan dengan keputusan-keputusan judisial (lihat Held 2006).

¹ Seymour Martin Lipset (1959) adalah salah satu pemikir klasik yang juga percaya demokrasi adalah kemewahan yang dimiliki masyarakat yang makmur.

Proses demokrasi, terutama proses pembuatan keputusan yang melalui mekanisme parlemen, dicela sebagai proses yang inefisien, terpertangkap dalam kepentingan politik jangka pendek dan sulit menghasilkan keputusan yang kolektif yang lebih baik dibanding apa yang bisa dilakukan pasar bebas. Lebih dari itu, neoliberalisme menghendaki pengisolasian lembaga-lembaga kunci dan berpengaruh luas terhadap hajat hidup orang banyak dari tekanan demokrasi. Atas nama independensi terhadap kepentingan semua golongan, kerumitan isu yang ditangani dan kebutuhan sektor keahlian tertentu lembaga-lembaga, seperti Bank Sentral atau Mahkamah Konstitusi di Indonesia, menjadi semacam lembaga super dalam negara neoliberal yang tidak tersentuh partisipasi masyarakat secara langsung.

Kontradiksi Internal

Negara neoliberal, menurut Harvey (2005: 79-80), cenderung berada dalam kondisi tidak stabil secara terus menerus. Ketidakstabilan adalah produk beberapa kontradiksi yang tak terelakkan, terutama antara kewajiban menciptakan pasar bebas, hak dan kebebasan individu dan legitimasi politik di satu sisi; dan keberpihakan neoliberalisme pada kelas sosial tertentu, kecenderungan otoriterisme, dan ancaman keresahan sosial di sisi lain. Menurut tulisan ini, upaya menanggulangi ketidakstabilan dan kontradiksi internal tersebut menyediakan semacam “peluang struktural” yang membangkitkan fundamentalisme agama, nasionalisme, atau bahkan rasisme.²

Secara teoritik negara neoliberal adalah negara yang tidak banyak bekerja dan membiarkan pasar mengurus segalam macam aspek kehidupan. Tapi negara tidak bisa selamanya duduk diam karena harus melahirkan kondisi bisnis yang baik bagi investasi dan semua proses akumulasi kapital (Jessop 2002; Harvey 2005). Tugas ini membuat negara harus memiliki basis legitimasi yang kuat dari waktu ke waktu agar segala tindakannya yang menguntungkan dunia bisnis tidak memperoleh banyak tentangan. Negara neoliberal tidak menggunakan demokrasi untuk menjalankan tugas tersebut. Sulit dibayangkan negara akan mendengar suara rakyat dalam rangka membuka diri bagi investasi jika ini berarti penghapusan subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok. Begitu juga negara tidak akan membiarkan warganya menuntut jumlah upah yang memadai jika peningkatan daya kompetisi di pasar global sama maknanya dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah dan berharga murah.

Sebaliknya negara neoliberal mengambil cara non-demokrasi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro pasar dan menciptakan iklim bisnis

² “Peluang struktural” merupakan istilah yang penulis pinjam dari Sydney Tarrow yang menggunakannya untuk menjelaskan kemunculan aksi kolektif berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan kebijakan atau perubahan elit politik.

yang menguntungkan bagi investasi. Di negara berkembang seperti Chile—salah satu tempat pertama kali neoliberalisme dipraktikkan—kudeta militer berdarah pada 1974 yang menjatuhkan Salvador Allende yang terpilih dalam pemilu yang demokratis beberapa tahun sebelumnya membuka jalan bagi *Chicago Boys* untuk mewujudkan liberalisasi ekonomi besar-besaran (lihat Hoogvelt 2001). Sementara, di Indonesia setidaknya sebelum datangnya rezeki minyak di pertengahan 1970an, keleluasaan yang diperoleh *Berkeley Mafia* dalam merestrukturisasi ekonomi berdasarkan panduan buku teks neoliberal dimungkinkan setelah berkuasanya Soeharto dan militer yang mendapat dukungan penuh pengusaha, intelektual, seniman, mahasiswa, dan tokoh agama (Robison 1988; Hiarij 2003).

Tapi cara non demokrasi bukan keunikan negara-negara berkembang. Bahkan di negara-negara maju, termasuk yang dianggap demokratis seperti Amerika dan Inggris, pemulihan pasar bebas dilakukan dengan mengabaikan partisipasi masyarakat luas (lihat Hoogvelt 2001; Harvey 2005; Harvey 1989). Perlu diketahui, bagi para pendukungnya—para intelektual, pengusaha, dan lembaga-lembaga nirlaba—liberalisasi pasar dan perdagangan hampir tak ada bedanya dengan *counter revolution* dari atas untuk menundukkan dan mengalahkan sentra-sentra kekuatan populis seperti serikat buruh, universitas, media, lembaga penerbitan, sekolah, pemerintahan lokal, dan lembaga peradilan. Hasilnya adalah pembatasan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak di satu sisi; dan munculnya aktor seperti CEO dan gubernur bank sentral serta lembaga-lembaga seperti korporasi besar dan kelompok *think-tank* yang tidak memiliki basis representasi politik yang absah secara demokratis tapi memiliki kekuasaan menentukan yang teramat besar.

Tidak jarang, dan jika situasinya memungkinkan, kelas sosial ini bisa melakukan “kudeta.” Harvey (2005: 44-6) menunjukkan contoh kudeta tersebut dalam kasus kota New York di awal 1970an. Saat itu New York mengalami krisis fiskal akibat ekspansi ekonomi yang dilakukan pemerintah setempat untuk mengendalikan peningkatan kekecewaan sosial yang meningkat pesat sejak akhir 1960an. Para pengusaha perbankan dan investor memanfaatkan kesempatan dengan menolak penghapusan atau sekadar penundaan pembayaran hutang, yang membuat New York secara teknis bangkrut. Para pengusaha kemudian bersedia mengatasi kebangkrutan tapi dengan imbalan kendali atas pengelolaan anggaran pemerintah kota dan wewenang yang lebih besar untuk merestrukturisasi perekonomian dan membangun infrastruktur. Akibatnya, atas nama menciptakan iklim bisnis yang kondusif, hampir semua sumber daya publik yang tersedia digunakan untuk membangun infrastuktur yang bermanfaat bagi dunia usaha. Dan masih ditambah lagi dengan subsidi dan insentif pajak bagi perusahaan. Sedangkan upah buruh dibiarkan stagnan, semua layanan sosial dihapus, dan lembaga-lembaga sosial

seperti pendidikan dan rumah sakit diswastakan.

Kesenjangan antara jaminan kebebasan yang lebih besar yang disediakan pasar di satu sisi dan cara-cara tidak demokratis yang ditempuh dalam melahirkan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro hak milik pribadi dan investasi membuat negara neoliberal selalu berada di tubir jurang ketidakstabilan politik. Margareth Thatcher suatu ketika berucap, “...*there is “no such thing as society, only individual men and women”*” (dikutip Harvey 2005: 23). Thatcher tampaknya ingin menegaskan semua bentuk aksi kolektif—terutama negara dan serikat buruh—merupakan ancaman terhadap hak dan kebebasan individu—yang ia identikkan dengan mekanisme pasar itu sendiri. Kurang lebih sepuluh tahun setelah itu dunia mungkin menjadi lebih bebas berkat Thatcher dan neoliberalisme. Tapi kebebasan yang lebih besar bukan dimiliki individu laki-laki dan perempuan seperti yang ia bayangkan, melainkan sebagian besar atau bahkan hampir sepenuhnya milik korporasi besar beserta para CEO dan bankir. Harvey (2005: 79-80) menggambarkan kesenjangan kebebasan ini dengan nada sarkastik, “*It is one thing to maintain...that my health-care status is my personal choice and responsibility, but quite another when the only way I can satisfy my needs in the market is through paying exorbitant premiums to...highly profitable insurance companies*”. Lebih parah dari itu, lanjut Harvey, bahkan perusahaan asuransi memiliki kekuasaan yang tak terkendali, “...*to define new categories of illness to match new drugs coming on the market...*” Tidak mengherankan jika upaya menciptakan dan menjamin pasar bebas membuat negara neoliberal harus selalu siap menghadapi kekecewaan sosial yang bisa berkembang menjadi sekadar protes atau kerusuhan. Negara neoliberal karenanya cenderung menjadi negara yang sangat sibuk mengurus keamanan—keamanan sebagai *eufemism* untuk tuntutan masyarakat bagi kehidupan yang lebih sejahtera dan adil. Sebagai tambahan di negara-negara maju upaya memerangi *society* seperti yang dianjurkan Thatcher merusak solidaritas sosial yang justru diperlukan untuk menanggulangi perilaku-perilaku anti sosial—mulai dari kriminalitas, penggunaan obat terlarang dan minuman keras, pronografi, dan kekerasan dalam rumah tangga—yang lahir dari ketidakpuasan dan alienasi.

Kontradiksi ini secara sederhana bisa dilihat sebagai berikut. Agar bisa menjalankan tugasnya melindungi dan menjamin beroperasinya pasar bebas secara optimal, negara memerlukan legitimasi politik yang memadai untuk melahirkan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal. Tapi legitimasi tersebut sulit diperoleh sebab kebijakan-kebijakan neoliberal dalam praktiknya bertentangan dengan kepentingan dan kesejahteraan mayoritas penduduk. Jika negara bersikeras “menciptakan iklim bisnis yang kondusif” dan karenanya terpaksa mengambil jalan yang kurang demokratis atau bahkan jalan non demokrasi dalam proses

pembuatan keputusan, maka pilihan ini bertentangan dengan janji pasar bebas yang menjamin hak dan kebebasan individu. Sebaliknya jika negara lebih peduli pada hak dan kebebasan, terutama bagi kelompok sosial marginal yang paling membutuhkannya—seringkali bahkan hanya untuk sekedar menjamin subsistensi—maka kebijakan-kebijakan neoliberal perlu direvisi atau bahkan dirubah total.

Di sini, persoalan mendasar yang selalu dihadapi negara neoliberal di manapun adalah bagaimana menerapkan mekanisme dan prinsip-prinsip pasar bebas dalam segala aspek kehidupan masyarakat tanpa harus mengorbankan legitimasi politik. Dalam bentuk yang lebih konkret, bagaimana sebuah pemerintah neoliberal yang berkuasa bisa memenangkan pemilu yang demokratis tanpa harus meninggalkan kebijakan-kebijakan pro investasi yang merugikan mayoritas penduduk. Tapi bahkan setelah berkuasa, dengan dukungan politik memadai yang diperoleh melalui pemilu yang jujur dan bersih, negara neoliberal masih harus menghadapi keresahan sosial dan mengendalikannya agar tidak melahirkan ketidakstabilan politik yang “tidak kondusif bagi investasi.”

Nasionalisme, Fundamentalisme Agama dan Rasisme dari atas

Kontradiksi ini pertama-tama menjelaskan kebangkitan nasionalisme dan fundamentalisme agama yang bercampur dengan xenophobia dan rasisme di negara-negara kapitalis maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Austria, Italia dan Australia. Sejak kebijakan-kebijakan pro pasar dan perdagangan bebas bertolak belakang dengan kepentingan dan kesejahteraan mayoritas penduduk, hampir semua pemerintah di negara-negara neoliberal mengalami kesulitan membangun basis politik yang memadai melalui masyarakat sipil, dialog, dan debat publik yang menekankan deliberasi dan argumentasi yang masuk akal. Alasannya, jika publik diberi kesempatan untuk melakukan pertimbangan rasional, sangat sulit dibayangkan neoliberalisme bisa diterima tanpa tantangan sengit. Beberapa strategi pengalihan masalah dan teknik penyampaian dilakukan sejumlah pemerintah untuk meloloskan kebijakan seperti privatisasi dan reformasi hubungan buruh-majikan. Di Australia misalnya, saat memperjuangkan legalisasi RUU hubungan industrial yang baru—yang dikenal dengan *Work Choice*—Pemerintah John Howard yang sangat pro pasar menekankan aspek-aspek seperti jaminan akan rendahnya tingkat pengangguran dengan diberlakukan UU tersebut sembari mengabaikan dan menutup-nutupi lemahnya hak pekerja, bahkan sekedar untuk menegosiasikan upahnya. Tapi pemilih Australia tidak bisa dikelabui. Dalam pemilu 2007 isu *Work Choice* merupakan salah satu faktor penting kekalahan telak John Howard dan Partai Liberal.³

3 Penulis menyaksikan sendiri secara langsung perdebatan tentang *Work Choice* dan pemilu parlemen 2007 di Australia.

Umumnya negara-negara neoliberal meninggalkan sama sekali argumen rasional maupun menggunakan metode-metode manipulasi seperti dalam kasus di atas dan menggantikannya dengan mobilisasi aspek-aspek irasional, wilayah bawah sadar dan proses-proses regresif para pemilih. Orientasi psikologis dalam upaya membangun legitimasi politik ini dilakukan melalui propaganda nasionalisme dan sentimen agama.⁴ Propaganda semacam ini memungkinkan banyak pemilih di Amerika, misalnya, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah, mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan materialnya dan berpihak pada hal-hal abstrak dan irasional seperti “hak istimewa bangsa Amerika sebagai pelindung kebebasan dan demokrasi” yang direpresentasikan George W. Bush. Nasionalisme dan sentimen agama yang disuarakan pemimpin lain seperti Margareth Thatcher, Ronald Reagan, Silvio Berlusconi, dan John Howard juga mengalihkan perhatian pemilih dari kesenjangan sosial dan diskriminasi rasial yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan neoliberal. Kemiskinan dan kemunduran sosial yang dialami kelompok tertentu—baik dilihat sebagai pekerja maupun dilihat sebagai kelompok etnik minoritas—tidak dilihat sebagai kegagalan mekanisme pasar tapi dikaitkan dengan “kualitas amalan” yang diajarkan nilai-nilai tradisional dan agama seperti kurangnya kerja keras, rendahnya perilaku ughari, dan sikap tidak mau menahan diri.

Nasionalisme dan sentimen agama dalam hal ini membantu neoliberalisme menciptakan stabilitas. Menurut Harvey (2005), sistem pasar yang cenderung anarkis, mengutamakan kompetisi dalam kehidupan sehari-hari, dan individualisme yang berlebih-lebihan, menimbulkan kekhawatiran—termasuk di tengah para neoliberalis sendiri—akhirnya situasi yang tidak terkendali dan sulit diatur. Situasi ini dibayangkan akan mengarah pada anomi dan runtuhnya ikatan-ikatan sosial yang menjadi awal bagi nihilisme dan anarki sosial. Neoliberalisme karenanya bisa berakhir dengan malapetaka politik dan ekonomi jika negara gagal menciptakan ketertiban dan stabilitas sebagai jawaban terhadap persoalan kepentingan individu yang cenderung *chaotic* dan mengedepankan supremasi moral sebagai kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keutuhan *body politic* terhadap bahaya yang datang dari dalam negeri maupun yang bersumber dari negara lain.

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan stabilitas, keberadaan musuh baik yang riil maupun yang sengaja diada-adakan yang mengancam integritas bangsa dan masyarakat menjadi penting (lihat Hardt and Negri 2003; Rupert 2005). Nasionalisme pertama-tama memberitahukan dan menjelaskan kepada publik tentang musuh, kemudian membenarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan demokrasi seperti militerisasi, penerapan UU anti teroris yang membatasi

4 Teknik ini dalam banyak hal menyerupai strategi yang ditempuh Adolf Hitler dan Nazi dalam membangun basis dukungan politiknya (lihat Adorno 1991).

hak dan kebebasan masyarakat, dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada aparat keamanan untuk menyadap, menahan dan menginterogasi tanpa harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku jika negara dalam keadaan normal. Praktis, musuh yang perlu diciptakan untuk menciptakan tertib sosial mendorong, misalnya, pemerintah Amerika di bawah pimpinan George W Bush memaklumkan, tulis Hardt dan Negri (2003), keadaan darurat yang permanen, yang membolehkan pemerintahnya bukan saja mengabaikan hukum tapi juga membatasi demokrasi. Sebab, Bush dan juga pemimpin lain seperti John Howard dan Tony Blair, percaya bahwa terorisme adalah ancaman terbesar terhadap keutuhan bangsa dan masyarakatnya, dan oleh karena itu, perang melawan terorisme adalah perang sepanjang masa.

Tapi, menggunakan nasionalisme untuk menciptakan musuh berakibat lebih dari itu. Nasionalisme membina rasa senasib dan sepenanggungan, diantaranya dengan membangga-banggakan mitos ataupun sejarah kejayaan masa lalu dan dengan membesarkan kelebihan-kelebihan riil maupun imajiner yang dimiliki negara dan masyarakat bersangkutan. Dalam terang semangat kebangsaan yang cenderung narsistik seperti ini, musuh hampir pasti dikonsepsikan sebagai entitas yang keberadaannya tidak memiliki legitimasi apapun, dan karenanya harus dieliminasi sampai ke akar-akarnya. Musuh tidak memiliki legitimasi—Mouffe (2005) menyebutnya *enemy* dan membedakannya dari *adversary* yang ia terjemahkan sebagai musuh yang *legitimate*—karena ia merepresentasikan keterbelakangan, tradisionalisme, fanatisme, imoralitas atau bahkan kebodohan yang bertolak belakang dan membahayakan kemajuan, kebebasan dan kemerdekaan sebagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki negara yang terancam. Di sini bisa dimengerti mengapa nasionalisme dan juga narsisme mudah berubah menjadi rasisme. Seseorang atau sebuah kelompok kulit berwarna tertentu menjadi musuh hanya karena mereka “bukan bagian dari kita” (yakni terbelakang, fanatik, anti kebebasan, dsb) dan “mereka” memusuhi “kita” hanya karena “mereka membenci—kelebihan-kelebihan—kita.”

Naomi Klein (2003) menjelaskan bagaimana nasionalisme negara-negara neoliberal paling maju di Utara direpresentasikan oleh para jurnalis dari kelompok media raksasa seperti BBC, ABC, NBC dan CNN dengan menggunakan *us* dalam membahasakan bukan saja dirinya tapi seluruh unsur peradaban Barat—yang secara gegabah oleh Huntington (1996) dilihat sebagai sebuah kesatuan yang utuh—terutama ketika membicarakan segala hal yang berkaitan dengan negara, bangsa, atau masyarakat non-Barat. Ungkapan *us* dan *them* mencapai titik kulminasi rasisme setelah serangan 11 September ketika George W. Bush secara implisit menggunakan *us* untuk menyebut Amerika dan dunia Barat yang demokratis, bebas, dan bermoral dan *them* untuk menyebut dunia non Barat (dalam hal ini

Islam) sebagai teroris dan sumber kemunduran dan keterbelakangan. Tidak heran jika Bush juga menggunakan ungkapan *crusade*, setidaknya pada masa-masa awal kampanye *war on terrorism*, sebelum menganulirnya setelah munculnya berbagai kecaman. Sebab ungkapan itu, salah satunya, merepresentasikan sikap rasisme terhadap bangsa dan peradaban lain yang dianggap tidak beradab dan perlu ditaklukkan demi kebaikan bangsa itu sendiri.

Sebagai tambahan, nasionalisme dan terutama sentimen agama juga diperlukan untuk memulihkan, menurut Harvey (2005: 83) “*a sense of moral purpose, some higher-order values that will form the stable centre of the body politic*” sebagai ganti sikap permisif yang ditimbulkan individualisme dan pengutamaan kepentingan pribadi. Harvey (2005: 84) menemukan tujuan moral ini terpusat pada nasionalisme budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai keluarga, keberpihakan pada *right-to-life* dan antagonisme terhadap berbagai bentuk gerakan sosial baru seperti gerakan feminis, gerakan homoseksual dan gerakan lingkungan. Tapi, yang paling penting nasionalisme dan sentimen agama memungkinkan pembentukan apa yang disebut Mary Kaldor (1999) sebagai *moral community*.

Di Amerika, misalnya, komunitas moral yang menjadi basis bagi *body politic* yang tidak tercerai beraikan oleh anomi dan anarkisme pasar dan individualisme, dicapai melalui promosi hak-hak asasi manusia dan kebebasan sebagai bagian dari “tugas suci” bangsa Amerika dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Tugas suci ini, dalam praktiknya, menjadi basis ideologi politik luar negeri Amerika sejak awal 1990-an. Sudah tentu promosi hak asasi dan kebebasan bukan ideologi baru dalam kebijakan luar negeri negara adidaya tersebut. Yang baru, menurut Mark Rupert (2005), adalah upaya pemerintah Bush menerjemahkan kembali hak asasi, kebebasan, dan demokrasi menjadi nilai-nilai moral yang benar dengan sendirinya—terutama menurut interpretasi negara besar dan kelas dominan—dan bersifat universal, sebagai warisan “peradaban Barat” yang paling berharga, yang harus ditebarkan di muka bumi. Moralisasi semacam ini bukan saja memungkinkan pemerintah Bush membenarkan tindakan ilegalnya memerangi Afghanistan dan Iraq sebagai *just war*, tapi juga menjadi sumber legitimasi bagi kebijakan-kebijakan neo-imperialisnya (lihat Rupert 2005).

Komunitas moral memungkinkan negara neoliberal menampilkan dirinya sebagai—meminjam salah satu kosa kata dalam budaya dominan di Indonesia—sebuah “keluarga besar” yang utuh dan bersatu. Konflik kepentingan dan ideologi tidak diperkenankan ada dalam “keluarga besar,” dilihat sebagai perilaku menyimpang, dan diterima sebagai sumber kekacauan dan instabilitas sosial. Komunitas moral karenanya menciptakan sebuah ruang baru yang memungkinkan neoliberalisme merestrukturisasi ekonomi atas nama kemaslahatan “keluarga besar” yang kosong dan menipu, tanpa harus mengindahkan protes kelompok-

kelompok sosial yang dirugikan. Selain itu, komunitas moral memudahkan negara neoliberal menampilkan dirinya sebagai sebuah korporasi besar yang utuh dan bersatu—seperti gagasan *Japan Inc.*—yang berkompetisi dalam pasar global. Kompetisi itu sendiri menghasilkan pihak-pihak yang kalah dan menang yang pada gilirannya menjadi dasar bagi kebanggaan nasional dan perasaan memiliki tujuan bersama.

Tak heran hampir semua negara yang menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberal dengan sengaja melakukan propaganda nasionalisme dan sentimen agama. Sementara Jepang adalah contoh klasik dan Korea Selatan dan Taiwan menjadi cerita sukses yang lain, Cina merupakan contoh kontemporer penggunaan idiom-idiom nasionalisme dalam perjuangan meraih posisi tertinggi dalam perekonomian dunia melalui kebijakan-kebijakan pro pasar. Pemerintah negara ini dengan tangkas menonjolkan kebanggaan nasional sebagai—bersama India—salah satu bagian dari ekonomi dunia yang bertumbuh paling pesat dan diperkirakan akan menjadi kekuatan di masa depan, sambil mengabaikan kemiskinan yang masih masif dan kesenjangan antar sektor dan wilayah yang masih akut. Di India upaya restrukturisasi ekonomi mendapat dukungan penuh dari ajaran Hindu yang sudah direinterpretasi, terutama oleh Partai Nasionalis Hindu. Sedangkan keberhasilan ekonomi Singapura berkaitan erat dengan upaya pemerintahnya memupuk solidaritas moral melalui kampanye nasionalis yang membesar-besarkan kerentanan posisi negara tersebut di tengah “lautan Melayu”—atau lebih tepatnya “lautan Islam” dalam konteks *war on terrorism* dewasa ini.

Di Indonesia sudah cukup lama, setidaknya sejak pertengahan 1990-an, gagasan tentang *Indonesia Inc.* diperdebatkan. Tapi sejak kebangkrutan ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis moneter 1997-98, kepentingan menciptakan sebuah komunitas moral, sebuah “keluarga besar” bangsa Indonesia, dalam rangka mendukung neoliberalisme memperoleh peluang lebih besar. Dalam beberapa tahun terakhir publik Indonesia semakin terbiasa mendengar keluhan tentang ketertinggalan negara ini dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, bukan saja di bidang ekonomi tapi juga di bidang-bidang lain seperti olah raga. Keluhan semacam ini pada gilirannya menjadi basis penting bagi perasaan senasib dan memiliki tujuan moral bersama tanpa harus mempertanyakan kembali makna dan ukuran ketertinggalan, atau sekadar mempersoalkan cara-cara yang ditempuh untuk mengejar ketertinggalan. Berkaitan dengan itu kebijakan-kebijakan neoliberal yang digalakkan Pemerintah Indonesia sejak kejatuhan Soeharto tidak lagi dipersoalkan dari sudut pandang keadilan sosial tapi diterima—atau ditolak—dengan alasan “kebanggaan nasional”, yakni pemulihan posisi atau bahkan “nama baik” Indonesia di kancah politik dan ekonomi dunia.

Arti penting nasionalisme dan sentimen agama sebagai sumber legitimasi

politik di negara-negara neoliberal maju tercermin dari perubahan basis dukungan pemerintahan yang berkuasa. Partai Republik di Amerika, Partai Konservatif di Inggris, Partai Liberal di Australia, dan partai-partai sejenis di negara-negara neoliberal lainnya membangun aliansi dengan kelompok dan asosiasi militan yang berbasiskan agama dan nasionalisme budaya. Kelompok militan ini pada mulanya menjadi sumber kekuatan partai-partai ultra kanan. Tapi, pemimpin seperti George W. Bush dan John Howard berhasil memenangkan hati kelompok tersebut dalam pemilu berkat postur politik yang menempatkan partainya pada batas tipis antara kebanggaan nasional, kebenaran agama, dan prinsip-prinsip suci di satu sisi, dan narsisme, xenophobia, dan rasisme di sisi lainnya.

Dalam situasi normal, Bush dan Howard tak lebih dari tipe pemimpin yang berkepentingan dengan nama besar bangsa dan negaranya di mata publik domestik maupun internasional. Tapi dalam keadaan yang tidak begitu normal, seperti kondisi tidak menentu yang ditimbulkan oleh ancaman serangan teroris, keduanya bisa berubah menjadi pemimpin yang anti imigran, mencurigai kelompok minoritas dan menghendaki purifikasi budaya dominan. Tidak heran jika ada saatnya, dalam pernyataan politik dan kebijakan tertentu, Bush dan Howard sulit dibedakan dari figur ultra nasionalis seperti Pat Buchanan dan Pauline Hanson. Kondisi tidak normal yang memungkinkan lahirnya rasisme juga terlihat dalam pemilihan presiden di Perancis pada 2002 (lihat Bauman 2006). Jacques Chirac dan Lionel Jospin sama-sama menjanjikan Perancis yang lebih aman dalam kampanyenya kepada para calon pemilih di tengah peningkatan pesat aksi kriminal dalam beberapa tahun terakhir di negara tersebut. Kedua-duanya percaya keamanan bisa tercapai jika pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas terhadap para pelakunya dan kepada kelompok pendatang. Propaganda yang berbau rasial karena menggabungkan kriminalitas dan kelompok pendatang dalam kategori ancaman disampaikan dalam bentuk paling sempurna oleh Jean Marie Le Pen dan membuatnya berhasil menyingkirkan Jospin sebelum putaran terakhir pemilihan. Chirac akhirnya menang, bukan lantaran penolakan terhadap rasisme, tapi karena mungkin rasisme Le Pen terlalu vulgar dan membangkitkan horor Aushewitz.

Perubahan basis dukungan politik paling nyata bisa dilihat pada perubahan basis elektoral Partai Republik dalam pemilu presiden yang dimenangkan Ronald Reagan (Harvey 2005). Partai ini beraliansi dengan kelompok Kristen Kanan, yang sebelumnya tidak pernah aktif tapi kemudian berubah menjadi gerakan politik penting sejak 1978. Sementara Kristen Kanan memerlukan Partai Republik yang didukung pebisnis kelas kakap untuk mensukseskan propaganda moral dan evangelikal yang diyakininya, aliansi menimbulkan pergeseran kekuatan dalam tubuh Partai Republik sendiri yang menguntungkan faksi yang di kemudian hari dikenal dengan kelompok neokonservatif. *Unholy alliance* ini (neokonservatif,

pebisnis besar, dan Kristen Kanan) perlahan-lahan berhasil mengkonsolidasikan dirinya sebagai kekuatan politik yang menentukan terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Turbulensi sosial yang timbul dan menjadi akut selama masa kepresidenan Bill Clinton memungkinkan *unholy alliance* mentransformasikan Partai Republik menjadi kekuatan politik sayap kanan yang masif dan berhasil memenangkan dua kali pemilihan presiden.

Sebetulnya jumlah penganut Kristen Evangelikal tidak lebih dari 20 persen pemilih Amerika. Keberhasilan Partai Republik, karenanya, juga berkaitan dengan dukungan kelompok kulit putih dalam kelas pekerja Amerika (Harvey 2005). Kelompok kelas pekerja kulit putih adalah kelompok yang memiliki *sense of moral righteousness* yang kuat. Tapi, sensasi moral ini berada dalam kondisi terancam sejak revolusi neoliberal menciptakan kehidupan ekonomi yang tidak aman dan beresiko tinggi dari sudut pandang kesejahteraan; sementara di saat bersamaan distribusi kesejahteraan yang masih tersisa melalui kebijakan-kebijakan afirmatif tidak menjangkau kelompok tersebut. Partai Republik melakukan propaganda nasionalisme budaya dan sentimen agama untuk mengembalikan *sense of moral righteousness* kelompok ini dengan menekankan nilai-nilai moral seperti kerja keras, kemandirian dan ughari; sambil mencela kebiasaan penggunaan dana-dana milik negara dalam jumlah yang besar untuk mensubsidi kelompok kulit berwarna, aktivitas pemberdayaan perempuan atau pelestarian lingkungan hidup; dengan efek rasisme, homophobia, dan anti feminisme secara terang-terangan maupun terselubung. Propaganda ini bukan saja berguna untuk pemilu tapi juga untuk mengalihkan perhatian konstituensinya dari kapitalisme dan neoliberalisme sebagai sumber persoalan yang sesungguhnya.

Rasisme dan *Color Blindness*

Arti penting lain uraian tentang perubahan basis dukungan politik di atas adalah untuk menunjukkan bahwa propaganda nasionalisme dan sentimen agama mudah melahirkan berbagai bentuk rasisme karena warganegara pada umumnya dan pemilih pada khususnya membeli ide-ide tersebut. Masyarakat semacam ini, yakni jenis masyarakat yang mudah termakan nasionalisme, sentimen agama dan rasisme, adalah masyarakat hasil bentukan neoliberalisme itu sendiri.

Seperti disebutkan di atas, negara neoliberal menekankan pentingnya pasar bebas yang diwujudkan melalui pengakuan hak milik pribadi dan penegakan aturan main sebagai basis utama bagi perlindungan dan jaminan hak dan kebebasan individu. Tapi, perlu dicatat makna hak dan kebebasan dalam terang semangat pasar bebas mengalami beberapa perubahan mendasar. Pertama, seseorang baru dihitung sebagai individu yang merdeka jika yang bersangkutan memiliki hak dan kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadi dengan menggunakan segala daya upaya yang

dimilikinya dan bersedia memikul tanggung jawab penuh atas segala perilaku dan tindakannya. Kedua, individu yang merdeka juga sama artinya dengan individu yang kehidupan pribadinya tidak dihambat dan tidak diintervensi dari segala bentuk hambatan sosial, baik yang bisa hadir melalui negara, masyarakat, atau sekadar komunitas sekitar tempat tinggal. Dengan lain perkataan, neoliberalisme menerjemahkan hak dan kebebasan individu sebagai pemuasan kebutuhan pribadi dan pengembangan diri dan menempatkannya sebagai urusan privat. Perlindungan terhadap hak dan kebebasan, serta perlindungan terhadap individualisme itu sendiri, karenanya identik dengan perlindungan terhadap wilayah privat dari segala macam intervensi wilayah publik. Pembelaan terhadap individualisme dan wilayah privat dan kecurigaan berlebih-lebihan terhadap wilayah publik sebagai tempat orang merancang aksi kolektif adalah ideologi di balik diktum populer Thatcher *there is “no such thing as society.”*

Privatisasi hak dan kebebasan—proses menerjemahkan dan menerapkan hak dan kebebasan sebagai urusan pribadi—melemahkan arti penting wilayah publik tempat nilai-nilai non material, non komersial, dan non rasio instrumental bisa dibicarakan, didiskusikan dan diperdebatkan.⁵ Pelemahan wilayah publik, terutama, membuat masyarakat menjadi sebuah kumpulan individu yang terisolasi satu sama lain; kehilangan sarana yang memadai untuk melakukan interaksi yang bermakna selain sekadar transaksi ekonomi; dan kekurangan motivasi untuk membangun etika kehidupan bersama. Hak dan kebebasan bahkan tidak lagi dikaitkan dengan keterlibatan setiap individu secara kolektif untuk menciptakan masyarakat demokratis—yang di dalamnya mengandung beberapa prinsip dan norma yang sengaja diadakan untuk mengatur kembali kepentingan pribadi dan wilayah privat itu sendiri agar memungkinkan terbentuknya apa yang dikenal dengan “masyarakat” yang tidak serta merta identik dengan (mekanisme) pasar seperti yang dibayangkan para neoliberalis. Bahkan dalam sebuah pasar bebas yang beranggotakan individu-individu yang lebih pusing dengan urusan pribadinya—sebagai makna paling hakiki dari hak dan kebebasan—sulit dibayangkan kekuasaan, setidaknya dalam pengertian mobilisasi sumberdaya, akan beroperasi berdasarkan standar tanggung jawab sosial tertentu. Sebaliknya, kekuasaan adalah masalah pribadi yang penggunaannya tidak perlu, paling tidak secara teoritik, dipertanggungjawabkan kepada orang lain.

Penyempitan makna hak dan kebebasan individu menjadi kepentingan pribadi dan eliminasi wilayah publik bukan saja menyulitkan dukungan bagi keberadaan *public good*, tapi yang terpenting membuat masyarakat sulit mengenali rasisme

5 Salah satu faktor penting yang melahirkan gagasan demokrasi deliberatif adalah kekecewaan para pendukung liberalisme terhadap penyempitan makna paham ini menjadi individualisme dan kepentingan pribadi. Gagasan demokrasi deliberatif, berkenaan dengan itu, adalah upaya dari dalam kubu demokrasi liberal itu sendiri untuk mengembalikan etika, deliberasi, dan wilayah publik sebagai faktor yang lebih menentukan dalam menjamin hak dan kebebasan (lihat Habermas 1 1992; Elster 1989).

sebagai isu politik dan etik yang bermakna. Sebaliknya, penghargaan terhadap hak dan kebebasan individu melahirkan apa yang diuraikan Zygmunt Bauman (1998: 47) dengan *“the suspicion against others, the intolerance of difference, the resentment of strangers, and the demands to separate and banish them...”* Sikap paranoid ini menjadi basis bagi terbentuknya komunitas berdasarkan kebersamaan rasa takut, tidak aman, dan terancam (Giroux 2006), yang diproyeksikan pada *others* yang kerap diproyeksikan pada kelompok-kelompok sosial tertentu yang terpinggirkan karena kelas dan warna kulit *“simply for reason of being an-other—bizarre and different perhaps, but first and foremost unfamiliar, not readily comprehensible* (Bauman 1998: 47)”. Penolakan terhadap perbedaan dan orang asing, seperti yang diungkap Nan Elin (dalam Bauman 1998: 47), terlihat dalam *“the growth in locked car and house doors and security systems, the popularity of gated and secure communities...and the increasing surveillance of public spaces”*. Ketakutan macam ini bukan berkaitan dengan integritas dan keutuhan negara atau masyarakat secara keseluruhan sebagai tempat individu menggantungkan jaminan kemanan dan keselamatannya—karena seperti halnya hak dan kebebasan, keamanan dan keselamatan pun menjadi urusan pribadi—melainkan menyangkut *“the isolation and fortification of one’s own homestead inside the city* (Bauman 1998: 48). *Watched neighbourhoods, closely surveilled public spaces with selective admission, heavily armed guards at the gate and electronically opertaed doors,* lanjut Bauman, *are all now aimed against the unwanted co-citizens, rather than foreign armies...”*

Rasisme sulit dikenali karena ditampilkan sebagai simbol budaya; menjadi perkara rasa, gaya hidup, jenis musik dan tradisi masa lalu; atau sepenuhnya diperlakukan sebagai urusan pribadi. Tidak seperti bentuk rasisme lama yang kasar dengan referensi biologis dan legitimasi pseudo ilmiah seperti yang dipropagandakan secara resmi oleh Adolf Hitler dan Nazi, rasisme jenis baru—yang diistilahkan Henry Giroux (2006: 76-7) *color-blindness*—justru menggunakan kosa kata gerakan-gerakan sosial pro HAM, menegaskan bahwa seorang individu harus dinilai berdasarkan karakter dan prestasi pribadi, bukan berdasarkan warna kulit. Konflik dan diskriminasi rasial ditolak dan diperingati sebagai sejarah kelam yang tidak lagi memiliki tempat dalam masyarakat modern yang percaya pada kebebasan dan demokrasi. Rasisme ini sesungguhnya tidak menolak keberadaan perbedaan rasial, melihatnya sebagai fenomena alami dan menyerahkan sepenuhnya kepada setiap individu untuk menampilkan atau menyembunyikan ciri khas rasnya—dalam berpakaian, bahasa tubuh, pilihan makanan dan ciri khas lainnya. Tapi, rasisme ini dengan tegas menolak perbedaan rasial sebagai faktor yang bertanggung jawab terhadap ketidakadilan yang mereproduksi kesenjangan antara kelompok dan keistimewaan bagi kelompok kulit berwarna dominan dan yang membawa

efek negatif dalam hal mobilitas ekonomi, pemilikan sumber daya sosial dan pengendalian atas kekuasaan politik. Dengan lain perkataan, perbedaan rasial sebagai penanda identitas dan kekuasaan dianggap tidak relevan dan sudah berhenti hadir dalam kehidupan sehari-hari dan tidak lagi menentukan kapasitas pribadi.

Persoalannya, dalam masyarakat yang ditandai dengan kesenjangan rasial dan kelas yang terlalu jelas untuk ditutup-tutupi, karakter dan prestasi pribadi sangat sulit diterima begitu saja sebagai faktor penentu mobilitas sosial dan ekonomi dan perbaikan standar hidup seperti yang dipropagandakan negara neoliberal. Menganggap warna kulit sebagai kepercayaan, nilai dan perilaku di wilayah privat, berarti juga gagal menjelaskan rendahnya tingkat kesejahteraan kelompok rasial tertentu di hampir seluruh aspek kehidupan. Sebuah laporan tentang kesenjangan rasial di Amerika mempertanyakan (dalam Giroux 2006: 77-8) *“Why are African-Americans twice as likely to be unemployed as whites? Why is the poverty rate for blacks more than twice the rate for whites? Why do nearly one out of every two blacks earn less than \$25,000 while only one in three whites makes that little?...Why do African-Americans make up roughly half of the United States’ massive population of prisoners (2 million) and why are one in three young, black male adults in prison or on parole or otherwise under the supervision of the American criminal justice system?”* Di sini *color-blindness* menjadi ideologi yang memungkinkan bermacam-macam pola diskriminasi dan isolasi sosial melalui kebijakan-kebijakan perumahan, pemberian pinjaman, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sistem peradilan menurut warna kulit. Ideologi ini juga menyediakan ruang yang bebas dari rasa bersalah, tanggung jawab sosial dan refleksi diri bagi kelompok dominan untuk meyakini kesuksesannya sebagai produk determinasi individual, etika kerja keras, nilai-nilai moral yang superior dan sikap bijak dalam berinvestasi terutama dalam hal pendidikan, sambil mengabaikan arti penting warisan ketidakadilan rasial yang menguntungkan dan berpihak pada nasib baik kelompoknya.

Rasisme baru juga sulit dikenali karena dibungkus nasionalisme dan nilai-nilai moral keagamaan. Seperti disinggung di atas, rasisme jenis ini tidak begitu menekankan superioritas kulit berwarna tertentu secara sempit—seperti superioritas ras Arya menurut Hitler—tapi lebih berkaitan dengan “ketakutan”, baik yang timbul dengan sendirinya berkat obsesi kepentingan pribadi maupun dipropagandakan oleh penguasa, terhadap kelompok kulit berwarna (Ansell 1997). Kelompok ini dianggap mengancam vitalitas ekonomi, sosial, dan politik yang dimiliki kelompok dominan karena tuntutan mereka atas perlakuan khusus atau hanya karena keberadaannya semata yang dilihat sebagai bentuk kontaminasi budaya itu sendiri. Berkenaan dengan itu kegagalan etnik dan ras minoritas untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik diterima sebagai cerminan kemampuan dan prestasi yang

dimiliki. Kemiskinan dan keterbelakangan kelompok tersebut, yang membentuk kantong-kantong dunia ketiga di dalam teritori negara-negara maju, tidak dilihat sebagai bukti ketidakadilan apalagi sebagai rasisme yang melembaga, melainkan dikaitkan dengan masalah-masalah seperti “budaya kemiskinan”, “budaya mabuk-mabukan”, “mentalitas tempe” dan berbagai idiom kultural lainnya, yang secara eksplisit mengandaikan kegagalan kelompok bersangkutan dalam mengintegrasikan dirinya dengan budaya dominan, yang dipandang netral, universal dan benar dengan sendirinya. Dalam konteks ini, kekalahan Lepen seperti yang diuraikan sebelumnya, disebabkan oleh postur rasisme vulgarnya yang ketinggalan jaman dan bertentangan dengan kosa kata HAM, kebebasan dan demokrasi. Sedangkan kemenangan Chirac adalah berkat *color-blindness* yang tampak steril terhadap perilaku rasialis tapi tetap diskriminatif dan mengabaikan ketidakadilan berdasarkan warna kulit.

Tegasnya, negara neoliberal di satu sisi sangat gencar mempropagandakan individualisme dan mengebiri wilayah publik karena sejalan dengan kebijakan-kebijakan pro pasar bebas. Di sisi lain, propaganda tersebut juga menjadi ideologi yang memistifikasi kegagalan restrukturisasi ekonomi, deregulasi, debirokratisasi dan privatisasi dalam mengatasi ketidakadilan rasial—bahkan membuatnya lebih parah—dengan mengalihkan persoalan dari kegagalan sistem menjadi kualitas pribadi. Bahkan, sekalipun para pendukung neoliberal bisa menunjukkan anggota kelompok etnis minoritas yang berhasil berkat kualitas pribadi, rasisme tetap hadir karena keberhasilan dan kualitas pribadi dipahami secara arbiter dengan kosa kata dalam budaya etnik dominan.

Penutup

Selama ini, komunalisme sering dianggap sebagai sisa-sisa masa lalu yang masih bertahan, terutama di negara-negara berkembang, yang menghambat negara-negara tersebut mengejar ketertinggalannya. Tulisan ini menunjukkan sebaliknya. Komunalisme bukan saja hadir tapi dengan sengaja dipropagandakan di wilayah maju, malah oleh pemimpin dan pemerintah yang dari hari ke hari tampil di media massa mengingatkan publik tentang bahaya komunalisme.

Tak lama setelah peristiwa serangan 11 September, Tariq Ali (2002) menulis tentang *The Clash of Fundamentalism* sebagai antitesis terhadap gagasan *The Clash of Civilization*. Argumen Ali sangat bisa diterima karena seperti digambarkan penulis George W. Bush sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam *clash* tersebut tidak kalah “fundamentalis”-nya di banding Osama bin Laden. Bahkan tulisan ini lebih jauh menjelaskan bahwa ke-fundamentalis-an Bush bukan karena dia “menganut agama tertentu” dan juga bukan karena agama yang dianutnya memiliki “teologi yang berbahaya bagai perdamaian dunia”. Tapi lantaran menjadi nasionalis dan fundamentalis justru bisa bermanfaat besar untuk hal-hal yang sekular, seperti

liberalisasi ekonomi yang menguntungkan dirinya sendiri dan membahagiakan nasib kelas sosial dominan yang menjadi basis utama dukungan politiknya.

Tulisan ini juga menunjukkan pemimpin komunalis seperti George W. Bush mudah menjadi populer dan memperoleh dukungan karena neoliberalisme yang hendak diwujudkannyanya memudahkan terbentuknya masyarakat yang individualistik dan cenderung anti wilayah publik, yang ujungnya melahirkan kecurigaan berlebihan dan ketakutan tak beralasan terhadap “orang asing.” Masyarakat semacam ini gampang terjebak dalam rasisme.

Daftar Pustaka

- Adorno, T. 1991. *The Culture Industry*. London: Routledge
- Ansell, A.E. 1997. *New Right, New Racism: Race and Reaction in the United States and Britain*. New York: New York University Press
- Appadurai, A. 1996. *Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis and London: University of Minnesota Press
- Barber, B. 1995. *Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World*. New York: Balantine Books
- Bauman, Z. 1998. *Globalization: The Human Consequences*. Oxford: Blackwell
- Bauman, Z. 2006. The Crisis of the Human Waste Disposal Industry. In D. Macedo and P. Gounari (ed), *The Globalization of Racism*. Boulder: Paradigm Publishers
- Elster, J. (ed.). 1989. *Deliberative Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Friedman, M. 1982. *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press
- Friedman, T. 1999. *The Lexus and the Olive Tree*. New York: Farrar, Straus and Giroux
- Fukuyama, F. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press
- Giroux, H. 2006. Spectacles of Race and Pedagogies of Denial: Antiblack Racist Pedagogy. In D. Macedo and P. Gounari (ed), *The Globalization of Racism*. Boulder: Paradigm Publishers
- Habermas, J. 1992. *Between Facts and Norms*. Trans. W. Rehg. Cambridge: Polity
- Hardt, M. and Negri, A. 2000. *Empire*. Cambridge: Harvard University Press
- Hardt, M. and Negri, A. 2006. *Multitude*. London: Penguin
- Harvey, D. 1989. *The Condition of Postmodernity*. Oxford and New Malden: Blackwell

- Harvey, D. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press
- Hayek, F. 1978. *The Constitution of Liberty*. Chicago: University of Chicago Press
- Hayek, F. 1994. *The Road to Serfdom*. Chicago: the University of Chicago Press
- Held, D. 2006. *Models of Democracy*. London: Polity Press
- Hiariej, E. 2003. *The Historical Materialism and the Politics of the Fall of Soeharto*. Canberra: Australian National University
- Hoogvelt, A. 2001. *Globalization and the Postcolonial World*. Basingstoke: Palgrave
- Huntington, S.P. 1996. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster
- Jessop, R. 2002. *The Future of the Capitalist State*. Cambridge: Polity.
- Kaldor, M. 1999. *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. Cambridge: Polity
- Klein, N. 2001. Reclaiming the Commons. *New Left Review* (II) 9
- Lipset, S.M. 1959. *Political Man*. London: Heinemann.
- MacEwan, A. 1999. *Neo-Liberalism or Democracy? : Economic Strategy, Markets, and Alternatives for the 21st Century*. London: Zed Books
- MacPherson, C.B. 1977. *The Life and Time of Liberal Democracy*. New York: Oxford University Press
- Mouffe, C. 2005. *On the Political*. Oxford: Routledge
- Rupert, M. 2005. In the Belly of the Beast: Resisting Globalisation and War In A Neo-imperial Moment. In C. Eschele and B. Manguashca (ed.), *Critical Theories, International Relations and 'the Anti-Globalisation Movement': The Politics of Global Resistance*. London. Routledge
- Nozick, R. 1974. *Anarchy, State and Utopia*. Oxford: Blackwell
- Robison, R. 1986. *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen and Unwin
- Tarrow, S. 1998. *Power In Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge, UK: Cambridge University Press
- Wood, E.M. 1999. *The Origin of Capitalism: A Longer View*. London: Verso
- Wood, E.M. 2003. *Empire of Capital*. London: Verso